

BAB III

KONDISI EKONOMI INDONESIA TAHUN 1999-2004

3.1 Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu masalah makroekonomi yang penting untuk dikendalikan, pentingnya hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwasannya inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif atas kesejahteraan masyarakat. Fenomena inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi di masa krisis berada pada angka -13,6% dan laju inflasi berada di angka 77,6%.¹

Krisis moneter yang melanda Indonesia telah memporak-porandakan struktur perekonomian Indonesia, bahkan krisis moneter tersebut berlanjut hingga ke krisis ekonomi dan politik yang menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan terhadap perekonomian dan perpolitikan di Indonesia. krisis yang melanda Indonesia ini diawali dengan terdepresiasinya secara tajam nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan menyebabkan lonjakan harga barang-barang yang diimpor Indonesia dari luar negeri.²

Nilai tukar memiliki peran yang sangat penting terhadap perekonomian suatu negara, terdepresiasinya nilai tukar rupiah berdampak pada tingginya angka inflasi nasional yang mencapai 77,6%. Nilai tukar yang fluktuatif sangat berdampak pada harga-harga barang baik bahan baku maupun bahan konsumsi,

¹ Bustanul Arifin. *Formasi Makro-Mikro Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pustaka INDEF, 2002.

² Adwin S Atmadja. *Inflasi Di Indonesia : Sumber-Sumber Penyebab Dan Pengendaliannya*. *Jurnal akuntansi dan keuangan* 1, 1999, hlm 55.

maka dari itu dengan adanya perubahan nilai tukar dapat menyebabkan adanya perubahan pada harga barang dan jasa domestik yang dikonsumsi masyarakat. Inflasi yang tinggi sangat berdampak pada pertumbuhan perekonomian Indonesia karena sangat berkaitan dengan daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi makro.

Inflasi tidak terjadi begitu saja melainkan dipicu oleh beberapa faktor sebagai sumber penyebabnya, inflasi juga salah satu indikator ekonomi penting bagi suatu negara khususnya pada negara berkembang untuk dapat melihat stabilitas perekonomian. Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi di Indonesia adalah kenaikan harga barang-barang impor, kekacauan ekonomi dan politik, jumlah uang yang beredar, defisit anggaran belanja pemerintah.³

Perkembangan inflasi yang meningkat di suatu negara akan memberikan hambatan pertumbuhan terhadap ekonomi untuk menjadi lebih baik, kebijakan pemerintah sangat diperlukan dalam mengatasi inflasi yang cukup tinggi untuk menjadikan perekonomian lebih baik dan krisis ekonomi tidak terjadi lagi akibat tingginya inflasi.

³ Tio Gholi Nugroho. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Indonesia Tahun 1999-2014*. Yogyakarta, 2016.

Tabel 1
Laju Inflasi Indonesia tahun 1999-2004

Bulan	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Januari	2,97	1,32	0,33	1,99	0,80	0,37
Februari	1,26	0,07	0,87	1,50	0,20	-0,02
Maret	-0,18	-0,45	0,89	-0,02	-0,23	0,36
April	-0,68	0,56	0,46	-0,24	0,15	0,97
Mei	-0,28	0,84	1,13	0,80	0,21	0,88
Juni	-0,34	0,50	1,67	0,36	0,09	0,48
Juli	-1,05	1,28	2,12	0,82	0,03	0,39
Agustus	-0,93	0,51	-0,21	0,29	0,84	0,09
September	-0,68	-0,06	0,64	0,53	0,36	0,02
Oktober	0,06	1,16	0,68	0,54	0,55	0,56
November	0,25	1,32	1,17	1,85	1,01	0,89
Desember	1,73	1,94	1,62	1,20	0,94	1,04
Tahunan	2,01	9,35	12,55	10,03	5,06	6,40

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Pasca terjadinya krisis moneter di Indonesia, perekonomian pun mulai mengalami perbaikan sehingga dari tahun 1999-2004 laju inflasi dapat dikendalikan oleh pemerintahan melalui berbagai kebijakan yaitu dengan melakukan pengendalian terhadap uang yang beredar dan kemudian menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia, meskipun pada tahun 2001 angka inflasi berada di angka 12,55% namun beberapa waktu kedepan inflasi menurun hingga angka 6,40% pada tahun 2004.

3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia mengalami pasang surut dalam masa pemulihan krisis ekonomi yang melanda Indonesia, akibat krisis moneter yang merambat menjadi krisis ekonomi hingga menjadi krisis multidimensional. Krisis multidimensional ini terjadi disebabkan oleh adanya berbagai krisis yang melanda Indonesia dan membuat genting di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial dan hukum. Pasca krisis 1998,

Indonesia terus mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga mempunyai sebuah landasan ekonomi yang kokoh dengan harapan dapat memperbaiki standar kehidupan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan dapat memperluas lapangan pekerjaan.⁴

Tabel 2
Laju Pertumbuhan ekonomi Indonesia

Indikator Makroekonomi	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,8	4,8	3,3	3,6	4,0	5,13
Laju Inflasi Kumulatif (%)	2,01	9,35	12,55	10,03	5,06	6,40
Suku Bunga Tahunan (%)	22,9	16,16	17,4	15,8	10,55	7,17
Nilai Tukar (Rupiah per US\$)	7.100	9.599	10.400	9.200	8.500	9.100

Sumber : Formasi Strategi Makro-Mikro Ekonomi Indonesia⁵.

Dilihat dari tabel di atas laju pertumbuhan perekonomian Indonesia mulai memperlihatkan kenaikan dari tahun ke tahun, hal tersebut merupakan dampak positif dari kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah dalam menangani pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis. Pemerintah dalam menangani hal tersebut memberikan kebijakan dengan melakukan likuidasi terhadap perbankan yang pada akhirnya dapat menarik kembali para investor asing untuk kembali memulai kegiatan ekonominya di Indonesia.

⁴ Robinson Tarigan. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sejak Era Reformasi (1998)*. 2007, hlm 1–3.

⁵ Bustanul Arifin, *Formasi Makro-Mikro Ekonomi Indonesia* . Jakarta: Pustaka INDEF, 2002, hlm 17.

Perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Habibie berada dalam titik terjun bebas dimana nilai tukar rupiah atas dollar pada awal bulan Mei hingga Juni dari Rp8.000,00 menjadi lebih dari Rp16.000,00 dan tingkat inflasi hingga mendekati angka 100%. Nilai tukar rupiah pada saat itu terperosok tajam, hal tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat dimana harga-harga melonjak tinggi dan barang-barang menjadi langka. Krisis ekonomi yang disertai dengan adanya suatu resesi bahkan dengan depresi sekaligus biasanya disertai dengan adanya penurunan dari harga barang-barang, namun berbeda dengan Indonesia dengan nilai rupiah yang terperosok menjadikan semua barang melonjak tajam.⁶

Industri Indonesia sebagian besar bergantung pada bahan baku dan bahan penolong Impor maka harga barang-barang pokoknya ikut melonjak hingga 2 kali lipat, daya beli masyarakat ikut merosot tajam dan tidak mampu menyerap hasil produksi mengakibatkan pabrik-pabrik tersebut gulung tikar dengan adanya hal tersebut banyak sekali karyawan yang tidak memiliki pekerjaan dan mengakibatkan tingginya jumlah angka pengangguran dan angka penduduk miskin pun semakin tinggi.

Terkendalinya nilai rupiah dan penanggulangan krisis merupakan dua arah sasaran reformasi pada bidang ekonomi, rupiah secara pasti berbalik arah menguat dan stabil seperti pada tahun 1999 dalam kuartal pertama selama beberapa saat kurs rupiah stabil pada kisaran Rp8.700,00/ US\$,

⁶ Kwik Kian Gie. *Ekonomi Indonesia Dalam Krisis Dan Transisi Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm 325-327.

Pemerintahan Presiden Habibie mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik inflasi menurun dan tingkat bunga bank cenderung menurun.

Terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden pada bulan Oktober 1999 memberikan harapan yang sangat tinggi bahwasanya akan memberikan suasana politik menjadi lebih tenang, program-program ekonomi pemerintahan akan berjalan makin mulus, namun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada Januari tahun 2000 hingga Desember tahun 2002 Presiden Abdurrahman Wahid menandatangani persetujuannya dengan IMF dimana memiliki program baru yang melibatkan agenda jangka menengah yang terdiri dari beberapa aspek, diantaranya kerangka makro ekonomi jangka menengah, kebijakan restrukturisasi, menata ulang institusi perekonomian, serta memperbaiki manajemen sumber daya alam.⁷

Kesepakatan yang dibuat oleh Presiden Abdurrahman Wahid ini berisi daftar panjang mengenai langkah-langkah akan adanya perombakan struktural ekonomi yang kompleks. Dalam pelaksanaan program-program yang sudah disepakati ini tidak berjalan dengan baik dimana terjadi ketegangan dengan IMF pun timbul yang mengakibatkan kepercayaan merosot, rupiah melemah di akhir tahun 1999 kurs rupiah sekitaran Rp8.700,00/US\$ dan melemah pada April 2000 melemah sampai Rp11.300,00/US\$. Selama tahun 2000 inflasi meningkat dari semula 2% pada tahun 1999 meningkat kekisaran 9,4% pada tahun 2000, selain itu beberapa indikator mengenai pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi mulai menguat dimana

⁷ Haryo Aswicahyono and David Christian. *Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016*. Jakarta, 2017, hlm 2

pertumbuhan ekonomi meningkat lebih tinggi dari yang sudah diperkirakan, pertumbuhannya mencapai 4%.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada dekade 1980 hingga pertengahan tahun 1990an, proses pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan lambat disebabkan oleh suatu proses perbaikan dari fundamental ekonomi nasional yang tidak disertai dengan adanya kestabilan politik, penyelesaian konflik sosial dan kepastian hukum hal tersebut merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam penentuan keputusan bagi negara-negara pelaku bisnis untuk melakukan usaha di negara tersebut. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengeluaran konsumsi juga mengalami peningkatan. Ekspor, investasi, dan konsumsi terhadap pertumbuhan PDB pada tahun 2000 juga mencapai 3%, kuatnya kinerja ekspor dan peran investasi yang terjadi meningkatkan dalam pembentukan PDB dapat mengindikasikan bahwa semakin mantapnya proses pemulihan ekonomi yang terjadi.⁸

Pada bulan Oktober tahun 2000 pemerintahan Abdurrahman Wahid mulai menunjukkan kesulitan anggaran, kesulitan yang dialami pemerintah tersebut sebagian besar terkendala oleh pembayaran utang, belanja subsidi dan asumsi anggaran. Selama orde baru hingga pemerintahan Abdurrahman Wahid negara Indonesia masih sangat memerlukan bantuan pinjaman dari luar negeri untuk memulihkan beberapa komponen penting dari rencana anggaran

⁸ Abdul Hakim. Perbandingan Perekonomian Dari Masa Soekarno Hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945-2009). *Ekonomi Bisnis* 03, 2012, hlm 161–180.

pendapatan dan belanja negara (RAPBN), serta pemulihan defisit investasi tabungan domestik dan kegiatan ekspor impor.

Lengsernya pemerintahan Abdurrahman Wahid digantikan oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarno Putri yang dilantik pada bulan Agustus 2001. Era Presiden Megawati ini ditandai dengan berakhirnya suatu program reformasi kerjasamanya dengan International Monetary Fund (IMF) pada sekitar bulan Desember 2003, dengan berakhirnya kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) pemerintah melanjutkan program reformasi ekonominya secara mandiri, hal tersebut dilakukan guna menciptakan stabilitas ekonomi makro dan melanjutkan restrukturisasi keuangan serta meningkatkan ekspor, investasi dan kesempatan kerja. Tim ekonomi baru dibawah pimpinan Presiden Megawati ini mulai memfokuskan pada faktor-faktor yang paling mendasar yaitu tentang mengembalikan kepercayaan pasar terhadap program-program yang akan digulirkan pemerintah.⁹

Masalah pokok dalam bidang ekonomi yang dihadapi oleh kabinet gotong royong pada masa pemerintahan Presiden Megawati ini adalah ketidak terkendalinya fluktuasi nilai tukar rupiah, adanya utang pemerintah yang belum tuntas dan juga belum tuntasnya penyehatan perbankan nasional, dengan adanya hal tersebut mengakibatkan meningkatnya pengangguran, menurunkan tingkat pendapatan serta nilai beli masyarakat, dapat dilihat dari

⁹ Boediono. *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2016, hlm 204-207

tabel 2 angka pengangguran pada masa pemerintahan Megawati dari tahun 2001-2004 mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Pada tanggal 27 Agustus 2001 untuk kesekian kalinya Indonesia menandatangani *Letter of intent* (LoI) dengan International Monetary Fund (IMF) dengan bantuan dana sebanyak US\$ 400 juta, dengan adanya persetujuan itu membentangkan jadwal waktu bagi serangkaian program reformasi termasuk tetap mempertahankan suatu batas terhadap defisit anggaran belanja pemerintah dan menjual mayoritas saham di sebuah bank yang bermasalah. Sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam progres dan kebijakan di Indonesia telah dilakukan revisi pada tahun 2001, tim dari IMF membawa enam agenda prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia diantaranya :

1. mengontrol uang yang beredar;
2. melakukan semua revisi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2001;
3. mengumumkan perolehan pendapatan Badan penyehatan perbankan nasional (BPPN) dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
4. mengumumkan hasil kaji ulang komite ombudsman ;
5. melakukan penyehatan atas bank internasional Indonesia.;
6. meneruskan penjaminan bank dengan mengisi rekening 502 ¹⁰

Persetujuan dari revisi *Letter of intent* ini dari ke enam langkah diatas ada dua hal yang mengganjal yaitu mengenai Privatisasi Badan Usaha Milik

¹⁰ Bustanul Arifin. *Formasi Strategi Makro-Mikro Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 39-40
Rekening 502 merupakan rekening penjaminan bank.

Negara (BUMN) dan percepatan penjualan aset badan penyehatan perbankan nasional (BPPN). Pada awal-awal masa pemerintahan Presiden Megawati banyak melakukan privatisasi karena sudah melakukan persetujuan dengan International Monetary Fund (IMF), adapun diantaranya adalah : PT Indosat, PT Batu Bara Tambang Asam, PT Kimia Farma, dan lain-lain. Privatisasi PT Indosat paling disoroti oleh masyarakat serta dapat kritikan tajam dari masyarakat salah satu alasannya adalah dengan pelepasan saham indosat sebesar 41,94% hanya menghasilkan dana sebesar Rp. 5,6 triliun saja, pemerintah dalam penjualan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini beralasan untuk menutupi kerugian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Memasuki tahun 2002 perekonomian Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya meskipun belum didukung sepenuhnya oleh struktur yang seimbang, perekonomian pun masih bertumpu pada konsumsi investasi sementara dan perkembangan ekspor pun masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada penghujung tahun 2002 terjadi sebuah peristiwa yang menghebohkan dunia yaitu peristiwa bom bali, peristiwa tersebut merupakan peristiwa terorisme terparah dalam sejarah sekaligus memperburuk citra bangsa dan negara dimata Internasional. Peristiwa ini juga berdampak pada hubungan kerja sama Indonesia dengan negara-negara lain, selain hal tersebut peristiwa ini juga berdampak pada perekonomian indonesia seperti pada bidang investasi dimana banyak negara memindahkan investasinya dari indonesia ke negara

lain yang dianggap lebih aman dengan hal tersebut mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran.¹¹

Selama tahun 2003 perekonomian Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan salah satunya adalah dampak dari terjadinya bom bali pada tahun 2002, rencana untuk keluar dari program International Monetary Fund (IMF) pada akhir tahun 2003 indonesia melakukan pemutusan kerjasamanya dengan International Monetary Fund (IMF), kondisi perekonomian dunia yang masih lesu. Pemerintah dengan Bank Indonesia telah mengambil beberapa rangkaian kebijakan untuk mendorong proses pemulihan ekonomi Indonesia dan tetap menjaga kestabilan ekonomi makro yang sudah berjalan, berkat berbagai langkah kebijakan yang sudah dilaksanakan kondisi ekonomi indonesia cenderung membaik dan mulai stabil. ¹²

Pada tahun 2004 merupakan sebuah fase baru dalam pengelolaan ekonomi dimana Indonesia menjadi negara terakhir diantara negara-negara yang mengalami krisis di Asia yang telah menyelesaikan program stabilisasi ekonomi makro di bawah pengawasan International Monetary Fund (IMF), Indonesia menyelesaikan programnya dengan International Monetary Fund (IMF) ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ekonomi makro indonesia sudah semakin membaik, serta rasa kepemilikan lebih tinggi karena sudah tidak didikte oleh International Monetary Fund (IMF) serta kuatnya komitmen untuk melanjutkan reformasi ekonomi secara mandiri.

¹¹ Riska Rahmawati, "Pengaruh Tragedi Bom Bali I Dan Bom Bali Ii Terhadap Kerjasama Ekonomi Dalam Sektor Perdagangan, Investasi, Pariwisata Indonesia - Australia" (2013),

¹² Abdul Hakim. *op.cit.*, hlm 170

Berakhirnya program bantuan International Monetary Fund (IMF) tersebut Indonesia menyetujui sebuah pemantauan pasca program (*Post Program Dialogue*) yang akan dilakukan oleh tim International Monetary Fund (IMF) dengan waktu kunjungan sebanyak 2 kali dalam setahun hal tersebut dilakukan untuk memantau jalannya reformasi ekonomi yang sudah dirancang oleh pemerintah dalam paket kebijakan *White Paper*. Pemantauan pasca program ini tidak hanya dilakukan oleh International Monetary Fund (IMF) saja tapi pernah dilakukan oleh Kadin Indonesia yang membentuk tim pemantauan independen yang memiliki kerja sama dengan beberapa kamar dagang asing. Sejak awal tahun 2004 perhatian publik sudah teralihkan ke pemilihan presiden, masa jabatan pemerintahan Megawati berakhir pada tanggal 20 Oktober 2004 dan kemudian digantikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.¹³

3.3 Meningkatnya Pengangguran Indonesia Tahun 1999-2004

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting dalam menilai suatu kinerja perekonomian, terutama dalam pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh suatu negara atau wilayah, ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam

¹³ Haryo Aswicahyono and David Christian., *op.cit.*, hlm 4-5

pembagian dari penambahan pendapatan tersebut , yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan dan pengangguran.

Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) merupakan angkatan kerja yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan atau sedang dibebastugaskan baik akan dipanggil kembali atau tidak. Pengangguran terbuka ni terjadi akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada penambahan tenaga kerja, hal tersebut mengakibatkan mereka menganggur secara nyata, paruh waktu dan dengan hal tersebut dinamakan pengangguran terbuka.¹⁴

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama ketenagakerjaan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk di dalamnya Indonesia, pengangguran merupakan suatu masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, salah satu faktor penyebabnya adalah populasi penduduk Indonesia yang tinggi sehingga memunculkan angkatan kerja yang baru setiap tahunnya dan sangat berdampak pada tingkat pengangguran.¹⁵

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 1999 -2004 Jumlah penduduk pada tahun 1999 (tanpa Timor Timur) menurut proyeksi berdasarkan SUPAS 1995 mencapai sekitar 206,5 juta jiwa, Jumlah penduduk tahun 2000 adalah 203.5 juta, Jumlah penduduk tahun

¹⁴ Bustanul Arifin, *Op.cit.*, hlm 19.

¹⁵ Dian Priastiwi and Retno Herniawati Handayani, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum Dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah," *Diponegoro Journal of Economics* 1, no. 1 (2019): 166,

2001, 2002, 2003, dan 2004 adalah 206,3 juta, data penduduk tahun 2002 adalah angka sementara estimasi penduduk yang dihitung dengan rumus matematik, Ini dikarenakan data proyeksi penduduk belum tersedia dan data penduduk tahun 2003 dan 2004 adalah angka estimasi penduduk bulan Juni 2003 yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk hasil Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) yang dilaksanakan pada bulan April 2003.¹⁶

Tingkat pengangguran merupakan salah satu ukuran efisiensi dalam perekonomian, ketika pengangguran terjadi, beberapa input tenaga kerja yang tersedia tidak digunakan, yang berarti hilangnya produksi. Penurunan produksi barang dan melakukan pemutusan hubungan kerja, Akibatnya pengangguran di dalam negeri semakin meningkat setiap tahunnya, terlihat pada tahun 2004 angka pengangguran mencapai angka 10 juta orang.

Tabel 3
Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran 1999-2004

Tahun	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran
1999	94.847.178	88.816.859	6.030.319
2000	95.650.961	89.837.730	5.813.231
2001	98.812.448	90.807.417	8.005.031
2002	100.779.270	91.647.166	9.132.104
2003	102.750.092	92.810.791	9.939.301
2004	103.973.387	93.722.036	10.251.351

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016.

¹⁶ Badan Pusat Statistik, "Statistik Indonesia". 2001, hlm 25.

Tabel 4

Tingkat Pengangguran Terbuka menurut provinsi (Persen) tahun 1999-2004

Provinsi	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Aceh	7,56	4,80	7,71	9,34	8,97	9,35
Sumatera Utara	7,67	8,52	9,09	10,30	11,02	11,08
Sumatera Barat	5,88	4,38	8,74	9,62	10,38	12,74
Riau	7,62	5,93	6,43	9,57	10,74	15,25
Jambi	3,47	3,68	5,61	5,78	6,50	6,04
Sumatera Selatan	5,03	5,73	6,32	8,14	9,08	8,37
Bengkulu	3,39	3,25	6,01	6,45	7,48	6,29
Lampung	4,58	5,24	6,39	8,32	9,14	7,38
Kep. Bangka Belitung	-	-	7,08	5,23	7,37	7,14
DKI Jakarta	15,01	12,08	15,07	14,39	14,86	14,70
Jawa Barat	9,83	8,99	11,77	13,19	12,49	13,69
Jawa Tengah	4,35	4,86	6,17	6,66	7,02	7,72
Di Yogyakarta	3,74	3,54	5,18	5,21	5,62	6,26
Jawa Timur	4,95	4,39	6,51	6,43	8,79	7,69
Banten	-	-	12,32	14,15	14,18	14,31
Bali	2,49	2,96	2,89	4,52	5,36	4,66
Nusa Tenggara Barat	1,44	4,30	5,82	6,94	6,34	7,48
Nusa Tenggara Timur	2,93	2,46	4,26	4,35	4,02	4,48
Kalimantan Barat	2,02	4,23	4,84	8,57	6,53	7,90
Kalimantan Tengah	3,67	3,70	6,14	6,38	7,59	5,59
Kalimantan Selatan	2,37	3,97	5,91	9,22	7,67	6,02
Kalimantan Timur	10,99	8,88	6,81	11,76	9,69	10,39
Sulawesi Utara	7,75	8,66	10,21	11,35	10,79	10,91
Sulawesi Tengah	4,39	5,09	8,25	8,06	4,64	5,85
Sulawesi Selatan	6,48	6,44	10,39	12,29	17,32	15,93
Sulawesi Tenggara	4,36	3,10	7,51	8,33	10,30	9,35
Gorontalo	-	-	7,78	13,17	10,17	12,29
Maluku	4,70	-	11,28	8,08	12,63	11,67
Maluku Utara	-	-	9,32	15,25	7,50	7,53
Papua	6,42	3,62	5,82	6,01	6,21	8,00
Indonesia	6,36	6,08	8,10	9,06	9,67	9,86

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tingginya jumlah pengangguran ini berdampak pada kehidupan masyarakat di bawah garis kemiskinan semakin tidak terkontrol, dengan bertambahnya pengangguran maka angka kemiskinan terus bertambah dengan pertumbuhannya yang sangat cepat. Terjadi krisis ekonomi di Indonesia mengakibatkan banyaknya kekacauan yang terjadi di berbagai daerah, pertumbuhan ekonomi menurun, inflasi meningkat, angka pengangguran meningkat, angka kemiskinan meningkat dan lain-lain.

Krisis ekonomi melanda wilayah desa mengakibatkan sebagian dari warganya bermigrasi ke kota-kota besar, ketidaksiapan kota untuk menampung serta menurunkan primary social control membuat para pendatang melakukan berbagai aksi dengan cara tidak sah untuk tetap mempertahankan hidupnya. Pada tahun 2000 di sembilan wilayah Polda Metro Jaya (Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Tangerang, Bekasi, Depok dan KPPP Tanjung Priok) total kejahatannya berjumlah 16.346 kasus dan tahun sebelumnya mencapai 18.603 kasus.¹⁷

Tingkat kriminalitas Indonesia setiap tahunnya mengalami pasang surut dimana pada tahun 2000 angka kriminal mencapai 172.532 Kasus, tahun 2001 mencapai 187.226 kasus, tahun 2002 184.359 kasus, tahun 2003 mencapai 196.931 kasus dan tahun 2004 mencapai 220.886 kasus, faktor kemiskinan dan pengangguran mengakibatkan tingginya angka kriminalitas di Indonesia.

¹⁷ Ahyar, "Analisis Data Statistik Kriminalitas Polisi Terhadap Dimensi Kejahatan Di Perkotaan. 2001, hlm 62.

3.4. Tingkat Kemiskinan Indonesia tahun 1999-2004

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak cukupan pendapatan dan harta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti pangan, sandang, papan, kesehatan serta pendidikan. Secara umum, kemiskinan dapat diukur dalam dua dimensi yaitu dimensi *income* atau kekayaan dan dimensi non-faktor keuangan. Kemiskinan dalam dimensi *income* ini dapat diukur dari rendahnya pendapatan yang diterima, sedangkan non-faktor dapat diukur dari adanya keputusasaan dan ketidakberdayaan yang juga dapat menimpa rumah tangga yang berpenghasilan rendah.¹⁸

Kemiskinan merupakan pekerjaan yang cukup besar bagi pemerintah dimana kemiskinan ini dapat ditandai oleh berbagai hal seperti kualitas hidup penduduk, mutu pangan, tidak berkecukupan, dan lain-lain. Upaya-upaya untuk mengurangi angka kemiskinan sudah dilakukan seperti penyediaan pangan, pelayanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, pendidikan dan sebagainya. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan berbagai bencana alam yang melanda membawa dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat seperti melemahnya kegiatan ekonomi, penurunan produksi barang dan jasa, memburuknya pelayanan kesehatan dan pendidikan, mengakibatkan kembali naik angka kemiskinan di Indonesia yang dimana sebelum terjadinya krisis angka kemiskinan sebesar 22,5 juta atau sebanyak 11,9% yang kemudian meningkat setelah terjadinya krisis

¹⁸ Ginanjar Syamsuar, "Dekomposisi Kemiskinan Sektor Indonesia Pada Tiga Periode Pemerintahan Tahun 1999-2011". Universitas Indonesia, 2012,

ekonomi menjadi 47,97 juta atau sebanyak 23,43% peningkatan kemiskinan yang cukup drastis pada saat itu.

Tabel 5
Jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan tahun 1999-2004

Tahun	Jumlah penduduk Miskin (Juta Orang)			Persentase penduduk Miskin			Garis kemiskinan (Rp/per kapita/bulan)	
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43	92.409	74.272
2000	12,31	26,43	38,74	14,60	22,38	19,14	91.632	73.648
2001	8,60	29,27	37,87	9,79	24,84	18,41	100.011	80.382
2002	13,32	25,08	38,39	14,46	21,10	18,20	130.499	96.512
2003	12,26	25,08	37,34	13,57	20,23	17,42	138.803	105.888
2004	11,37	24,78	36,15	12,13	20,11	16,66	143.455	108.725

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Terlihat pada tahun 1999 jumlah penduduk miskin mencapai 47,97 juta orang dengan persentase 23,43% hal tersebut merupakan suatu puncak kemiskinan tertinggi setelah dilaksanakan reformasi, kemudian tahun-tahun berikutnya terlihat penurunan tingkat kemiskinan secara terus menerus dan bertahap, Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan, dimana setiap kebijakan cukup berdampak terhadap penurunan kemiskinan diantaranya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dianggap pemerintah sebagai program yang berhasil dan juga Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang dinilai oleh Bank Dunia sebagai Proyek atau kegiatan yang berhasil.¹⁹

Kemiskinan di daerah mengalami dinamika naik turun setiap tahunnya baik kota maupun desa sekalipun, seperti terjadi pada daerah Aceh

¹⁹ Multifiah, "Telaah Kritis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Tinjauan Konstitusi," *Journal of Indonesian Applied Economics* 5, 2011, hlm 19.

Darussalam dimana angka kemiskinan perkotaan mengalami peningkatan dimana tahun 2000 berada di angka 10,45% dan pada tahun 2004 di angka 17,58% serta kemiskinan di pedesaan pada tahun 2000 berada di angka 16,78 dan tahun 2004 berada di angka 32,66%. Daerah lain juga selian Aceh mengalami dinamika yang sama mengenai kemiskinan dimana daerah Jawa Tengah mengalami naik turun persentase kemiskinan perkotaan di tahun 2000 mencapai 20,23 %, pada tahun 2001 mengalami penurunan persentase kemiskinan berada di angka 11,41% dan mengalami peningkatan pada tahun 2002 di angka 20,50% kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2003 di angka 19,66 serta tahun 2004 turun ke angka 17, 52%. (lengkapnya terdapat di lampiran halaman 5).